

Komitmen Anti-Korupsi Presiden: Belajar Pengalaman Internasional

Wahyudi Kumorotomo

Salah satu agenda mendesak bagi Presiden dan Wapres yang baru saja dilantik adalah kejelasan garis kebijakan menyangkut pemberantasan korupsi. Inilah yang tetap banyak dinanti orang dalam seratus hari pemerintahan SBY-Boediono. Komitmen dari perumus kebijakan paling atas adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi arah pemberantasan korupsi di tanah-air. Masalahnya adalah bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini publik masih merisaukan komitmen presiden kendatipun selama masa kampanye menjelang Pemilu tema pemberantasan korupsi telah menjadi "*trade-mark*" SBY.

Dalam konflik terbuka antara Polri dan KPK, tampak bahwa sikap presiden masih mendua. Yang lebih memprihatinkan sebenarnya bukan sekadar nasib KPK sebagai lembaga yang memang bersifat *ad hoc*, tetapi upaya pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Dalam hal ini ada baiknya kita belajar dari pengalaman negara-negara lain. Kalau kita tidak ingin terperosok jajaran negara terbelakang yang berkubang dalam persoalan korupsi, pengalaman itu akan memberi banyak pelajaran berharga.

Amerika Serikat

Sebagai sebuah negara adidaya dengan sejarah kemerdekaan yang panjang, Amerika Serikat dengan tradisi demokrasi yang kuat telah berhasil menekan korupsi. Tetapi bukan berarti bahwa korupsi bisa dikikis habis di negeri ini. Di awal abad ke-20, korupsi masih banyak terjadi dalam bentuk kejahatan terorganisasi selain korupsi yang bersifat politis. Belakangan, terungkap pula kasus-kasus korupsi yang melibatkan para eksekutif perusahaan besar seperti Enron dan Halliburton.

Penyuapan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang berkelindan dengan kejahatan terorganisasi yang dikendalikan oleh Mafia mencuat pada tahun 1940-an dengan tokoh-tokoh mafioso seperti Al Capone dan Vito Corleone. Seperti digambarkan dalam banyak buku kisah nyata dan ratusan film tentang Mafia, kejahatan yang dilakukan oleh organisasi itu sangat lengkap dan semuanya serba keji dan gelap, mulai dari menyuap pejabat, mengancam hingga membunuh. Bisnis jaringan mafia juga semuanya serba ilegal dan melawan hukum, mulai dari penghindaran pajak, perjudian, prostitusi, pemerasan, rentenir, hingga narkoba.

Hanya dengan sikap yang tegas dari pemerintah dan tokoh-tokoh penegak hukum yang anti-suap dan profesional, jaringan kejahatan itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Gambaran yang ditunjukkan dalam film *Untouchables*, misalnya, menunjukkan betapa tokoh polisi seperti Eliot Ness dan Jim Malone yang konsisten dan bekerja tanpa lelah yang akhirnya bisa menggulung jaringan mafia pimpinan Al Capone. Rahasia dibalik keberhasilan itu adalah dukungan publik dan aparat penegak hukum yang berdedikasi. Tentu saja dukungan dari pemerintah juga sangat menentukan.

Kasus jaringan bisnis para mafioso yang terakhir adalah di negara bagian New York yang dipimpin oleh pentolan mafia John Gotti. Tokoh mafia ini begitu licin sehingga keterlibatannya dalam serangkaian pembunuhan dan kejahatan terorganisasi sangat sulit dibuktikan. Lalu muncul Rudolph Giuliani, seorang gubernur yang punya prestasi cemerlang ketika menjadi District Attorney yang mampu melumpuhkan jaringan mafia dan menangkap John Gotti.

Para operator mafia selalu bekerja rapi dalam jaringan dan bahkan seringkali tidak mengenal siapa yang memberi perintah kejahatan yang dilakukan. Tetapi dengan jitu Giuliani memanfaatkan teknologi untuk menyadap semua pembicaraan tokoh mafia dan menggunakannya sebagai bukti di pengadilan. Tentu saja ancaman dan intimidasi merupakan tantangan sehari-hari Giuliani dalam bekerja. Gotti akhirnya ditangkap, dihukum seumur hidup dan mati di penjara pada tahun 2002. Dengan teknologi, dedikasi, profesionalisme dan dukungan publik yang kuat akhirnya Giuliani mencatat prestasi sebagai salah satu gubernur yang berhasil memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi. Keberhasilan ini bahkan sempat mencuatkan namanya dalam bursa calon presiden AS.

Hong Kong

Kejahatan terorganisasi juga merupakan masalah mendasar di Hongkong pada awal tahun 1970-an. Banyak pelaku usaha di bekas koloni Inggris ini yang punya pengalaman buruk dengan Triad, organisasi kejahatan yang paling ditakuti dan membuat citra negara ini sebagai salah satu yang paling korup di Asia.

Gambaran tentang korupsi yang sudah merasuk di sektor publik juga sangat nyata. Setiap warga yang mengajukan skema pembelian rumah harus menyuap para petugas hingga pejabat tinggi di Kementerian Perumahan. Petugas ambulans akan meminta "uang teh" untuk tugas-tugas seperti mengantar pasien ke rumah-sakit atau mengangkut perangkat pertolongan pertama di lokasi kecelakaan. Hal yang sama terjadi dalam urusan air minum, perijinan, jaminan sosial, dan sebagainya.

Namun korupsi yang paling parah justru terjadi di jajaran Kepolisian. Banyak diantara polisi yang menawarkan beking bagi kegiatan perjudian, transaksi narkoba, dan sebagainya. Segala macam urusan yang terkait dengan kepolisian selalu berbau korupsi. Diantara para anggota Triad dan Polisi memang sering terjadi konflik, tetapi pada dasarnya pola perilaku mereka terkait dengan korupsi tidak banyak berbeda. Masyarakat tidak punya pilihan dan rasa gusar kepada jajaran polisi pun terpendam bertahun-tahun. Kegusaran publik meledak ketika Peter Godber, Kepala Kepolisian Nasional Hongkong, terungkap memiliki kekayaan hingga lebih dari HK\$ 4,3 juta dari hasil korupsi. Di tengah investigasi Kejaksaan Agung, Godber berhasil melarikan diri ke luar negeri. Ini memicu serangkaian demonstrasi jalanan yang digalang oleh para mahasiswa di Victoria Park pada tahun 1973.

Tuntutan publik itu membuahkan hasil dengan didirikannya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di tahun 1974. Berikutnya, upaya untuk mengekstradisi Godber dari negara Inggris juga berhasil. Godber diadili dengan tuduhan menerima suap dan melakukan konspirasi dengan para penjahat, akhirnya mendapat ganjaran 4 tahun penjara. ICAC terus menampakkan taringnya dengan menyeret banyak pejabat dan perwira polisi ke pengadilan korupsi. Gambaran dramatis tentang pendirian ICAC dan awal kinerjanya itu didokumentasikan dalam film karya Wong Jing berjudul "*I Corrupt All Cops*".

Banyaknya perwira polisi yang diadili oleh ICAC mengakibatkan resistensi diantara jajaran polisi. Sebagian polisi melakukan pemogokan nasional, dan sebagian bahkan menyerbu kantor pusat ICAC dengan melakukan berbagai aksi, intimidasi atau ancaman kekerasan. Tetapi rakyat Hongkong tidak mau menyerah. Pada tahun 1977, lebih dari 2.000 orang melakukan demonstrasi mendukung ICAC dan memprotes tindakan para polisi tersebut.

Di tengah situasi genting itu, tindakan pimpinan puncak sangat menentukan. Gubernur Murray MacLehose menunjukkan dukungan penuh kepada ICAC dan mendengar tuntutan rakyat yang sudah muak dengan korupsi dan memaksa jajaran

kepolisian untuk berbenah. Perwira polisi yang korup dipecat dan diberi hukuman setimpal, sedangkan aparat polisi baru yang relatif lebih bersih direkrut secara besar-besaran. Sikap yang konsisten terhadap pemberantasan korupsi juga ditunjukkan oleh Gubernur Chris Patten pada tahun 1993 ketika dia memecat Alex Tsui, Deputi Direktur Operasi ICAC, karena penyalahgunaan kewenangan. Kasus Alex Tsui di Hongkong mirip dengan kasus Antasari Azhar di KPK.

Upaya yang konsisten di Hongkong membuahkan hasil yang nyata. Jika pada tahun 1974 laporan warga mengenai kasus korupsi yang masuk ke ICAC sebesar 47% diantaranya terkait dengan polisi, maka pada tahun 2002 angka itu sudah sangat menurun menjadi 13% saja. Kini Hongkong menjadi salah satu kawasan yang bersih dari korupsi kendatipun ancaman kelompok Triad suatu saat mungkin muncul kembali.

Kenya

Cita-cita presiden pertama Jomo Kenyatta yang ingin menjadikan Kenya sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan makmur ternyata kandas bukan karena kurangnya sumberdaya dari negara ini tetapi karena semua kebijakan publik dibajak oleh para pejabatnya untuk kepentingan diri-sendiri. Gambaran tentang persoalan korupsi di Kenya cukup jelas. Pada tahun 2005, dari segi Indeks Persepsi Korupsi negara ini menempati peringkat 144 dari 159 negara yang disurvei. Untuk berbagai urusan pelayanan publik, rakyat Kenya harus melakukan 16 kali penyuaipan per bulan. Sebagian dari suap yang diberikan kepada pejabat itu mungkin jumlahnya kecil, tetapi ada yang mencapai hingga 50,000 shilling (sekitar US\$ 700). Secara total, nilai dari transaksi suap yang besar itu mencapai 41% dari nilai keseluruhan.

Ujian berat bagi upaya pemberantasan korupsi itu tampak dari skandal *Anglo Leasing* yang diungkapkan oleh seorang wartawan bernama John Githongo pada tahun 2006. Skandal bermula ketika pemerintah Kenya bermaksud memodernisasi sistem pencetakan paspor secara elektronik pada tahun 2002. Proses tender bagi perusahaan asing untuk maksud tersebut dimenangkan oleh sebuah perusahaan dari Inggris. Belakangan diketahui bahwa nilai tender tersebut telah digelembungkan hingga senilai 30 juta Euro karena konspirasi perusahaan tersebut dengan banyak tokoh di dalam pemerintahan. Laporan Githongo juga mengungkap bahwa banyak tender untuk proyek-proyek publik dikorup dengan melibatkan menteri kehakiman, keuangan, dan menteri transportasi hingga wakil presiden Moody Awori.

Presiden Mwai Kibaki tidak menunjukkan sikap yang tegas terhadap Wapres Moody Awori yang jelas-jelas terlibat dalam skandal *Anglo Leasing*. Upaya dari Githongo dan para aktivis LSM untuk membentuk lembaga anti-korupsi dan mengungkapkan kebenaran dari proses tender itu menemui jalan buntu. Sebaliknya, Githongo justru berulang kali ditawari oleh utusan-utusan pemerintah untuk menerima imbalan uang cukup besar apabila dia berhenti mempublikasikan masalah *Anglo Leasing* tersebut. Dan setelah berbagai ancaman serius akan keselamatan nyawanya, akhirnya John Githongo memilih untuk meninggalkan Kenya dan mengasingkan diri ke luar-negeri.

Akhir dari upaya pemberantasan korupsi di Kenya menyedihkan. Githongo yang bekerja sendiri tidak mungkin bisa mengubah keadaan, Sampai sekarang bangsa Kenya tetap ada di kubangan korupsi yang bukan saja semakin menyengsarakan rakyat tetapi juga benar-benar menghambat kemajuan bangsa ini.

Pelajaran untuk Indonesia

Soal pemberantasan korupsi, banyak pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman internasional. Dari keberhasilan memberantas korupsi di AS dan Hongkong, dapat dilihat bahwa betapapun komitmen presiden dan para pejabat puncak sangat penting. Dalam kasus konflik Polri-KPK di Indonesia, kita juga berharap bahwa presiden SBY bisa benar-benar jernih untuk berpikir bukan hanya kepentingan sesaat tetapi juga kepentingan masa depan bangsa. Komitmen dan ketegasan sikap sangat diperlukan dalam memberantas korupsi.

Dari AS kita juga melihat bahwa sebagai *extraordinary crime*, korupsi memang memerlukan tindakan luar-biasa seperti ditunjukkan oleh Giuliani. Kalau kewenangan KPK untuk menyadap pembicaraan koruptor yang selama ini cukup jitu untuk mengungkap korupsi itu justru dihilangkan, tampaknya KPK akan menjadi sangat lemah dan itu merupakan pertanda buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dukungan publik merupakan faktor yang juga sangat menentukan seperti dicontohkan dari kasus ICAC dan reformasi Kepolisian di Hongkong. Tetapi tentu saja dukungan terhadap komisi anti-korupsi ini harus pula didengar dan diakomodasi oleh para elit politik yang masih punya nurani untuk menyelamatkan bangsa. Kalau tidak, mungkin kita akan kembali terjerembab ke kubangan korupsi sebagai masalah bangsa yang laten seperti terjadi dalam contoh pengalaman dari Kenya. Apakah kita semua menginginkan terjadinya hal ini?

Penulis adalah dosen Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM